

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PADA PEMILIHAN PRESIDEN (PILPRES) TAHUN 2019 DI KOTA PEKANBARU

Oleh : Khai Rati Jannah

khairatijannah05@gmail.com

Dosen Pembimbing: Drs. Hasanuddin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP

Universitas Riau,

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km.12,5 Simp. Baru

Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-53277

Abstract

General elections are the main means for people to demonstrate their political rights in electing representatives of the people who will take control of the wheels of the nation's and future journey. The 2019 Presidential Election in Pekanbaru City experienced an increase in voter turnout, reaching 78.90% when compared to previous elections and even exceeding the KPU's target of 77%. High voter participation is a marker of concern for democratic citizens, while low voter participation is an indicator of apathy and distrust of citizens towards the political process.

This study aims to look at the factors that influence the political participation of voters. The theory used in this research is Milbrath's theory regarding the factors that influence participation. This research uses descriptive method with qualitative research type. The type of data used in this research is primary data, namely interviews and secondary data obtained from literature study, documentation and observation.

The results of this study found that the increasing political participation of Pekanbaru City voters in the 2019 Presidential Election was influenced by five factors, namely, political stimulation factors carried out by the Pekanbaru City KPU and election organizers, political parties as well as candidates and candidates and their success teams, personal characteristics factors. Pekanbaru City voters who are already rational, the social characteristics of voters, where education in Pekanbaru City is high and is a city center that tends to have a broad educated and insightful community, the situation and political environment during the 2019 Presidential Election, the situation is very interesting because of the rematch of two people who had running in the 2014 election, and the political education factor carried out by the election management institution and the political community. But of the five factors the most dominant influence is the political incentive factor and the factor of the political environment.

Keywords: *Political Stimulation, Voters Personal Characteristics, Voters' Social Characteristics, Political Situation, Political Education.*

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilu merupakan suatu arena kompetisi. Menang atau kalahnya suatu kandidat akan ditentukan oleh rakyat dengan menggunakan mekanisme pemungutan suara. Menentukan pilihan dalam pemilu merupakan hak setiap warga negara. Sebagai instrumen yang sangat penting dalam rangka untuk memilih dan ikut menentukan para wakil sekaligus pemimpin rakyat yang akan duduk dalam pemerintahan, pemilu memberikan kesempatan bagi warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah yang benar-benar dianggap mampu¹.

Wakil-wakil rakyat ini kemudian ditentukan atau dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu dalam jangka waktu tertentu untuk kemudian memperjuangkan aspirasi rakyat. Seperti yang sudah dijabarkan mengenai definisinya, dalam hal ini keikutsertaan warga negara dalam pemilu merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan dalam proses atau aktivitas politik. Terdapat beberapa bentuk pemilu yang diselenggarakan yaitu, pemilu daerah yakni untuk memilih kepala daerah seperti gubernur, bupati, atau walikota. Pemilu legislatif, yakni untuk memilih wakil rakyat. Serta Pemilu Presiden yakni untuk memilih Presiden dan wakil Presiden. Seperti yang kita tahu bahwa adanya demokrasi atau kebebasan untuk memilih merupakan sebuah kebutuhan yang dianggap penting di masa globalisasi saat ini.

Sebagaimana diketahui pemilihan umum tahun 2019 khususnya Pemilihan

Umum Presiden memiliki konstelasi politik yang lebih menyita perhatian publik yaitu, untuk kedua kalinya Joko Widodo kembali berhadapan dengan Prabowo Subianto dengan wakil yang berbeda². Ini menjadi salah satu faktor yang juga menyebabkan tingginya partisipasi masyarakat, karena pada Pemilu tahun 2019 dijadikan ajang untuk merebut dan akan memenangkan pertarungan oleh pihak Prabowo yang pada tahun 2014 mengalami kekalahan dari pihak Jokowi.

Pilpres tahun 2019 ini adalah *rematch* atau tanding ulang Pilpres 2014, Hanya saja wakilnya yang berubah di tahun 2019. Akan tetapi beberapa masyarakat juga merasa jenuh dan bosan dengan hanya ada 2 calon yang kembali menjadi calon di Pilpres 2019³.

Pemilu serentak jauh lebih kompleks dan rumit, baik bagi penyelenggara pemilu, parpol, maupun rakyat, sebab disatu sisi dengan adanya *presidential threshold* (PT) mereka harus berkoalisi dalam mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presidennya, disisi lain dalam saat yang bersamaan mereka juga harus berjuang secara sendiri-sendiri untuk merebut kursi legislatif. Dengan dilakukannya Pemilu Presiden serentak dengan Pemilu Legislatif Tahun 2019, Pemilihan umum Presiden akan mempengaruhi pemilihan umum legislatif. Artinya pemilih akan memilih Presiden dan memilih parpol pendukung Presiden⁴.

¹Cangara Hafied, *Komunikasi Politik (konsep, teori dan strategi)*, (Jakarta: PT Rajagrafindo persada), Hal 60

² LIPI Jurnal Penelitian Politik, *Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019*. Volume 16, Nomor 01, 2019

³ Rahardjo Dawam, *Sistem Pemilu: Demokratisasi dan Pembangunan*, (Jakarta: PT Pustaka Cidesindo), hal 75

⁴ Ratnia Solihah, *Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik*. Volume 3, Nomor 01, 2018.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum menyebutkan bahwa “untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang profesional, serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas melalui Komisi Pemilihan Umum”, sehingga dalam implementasinya dapat mewujudkan partisipasi masyarakat untuk mendukung terlaksananya pemilihan umum yang bersih, jujur, dan adil yang sesuai dengan spirit demokrasi dan kearifan lokal bangsa Indonesia. Selain itu Undang-Undang tersebut juga telah menyatakan bahwa “Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota atau yang berkaitan dengan merancang program-program yang berorientasi pada peningkatan partisipasi politik masyarakat⁵.”

Dengan meningkatnya partisipasi pemilih pada pemilihan umum Presiden tahun 2019 di Kota Pekanbaru ini selain tidak terlepas dari peran KPU Kota Pekanbaru itu sendiri dan juga di sebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan partisipasi masyarakat. Salah satu hal yang dapat dijadikan ukuran kualitas pemilihan umum adalah angka partisipasi pemilih atau angka pengguna hak pilih, yang mana partisipasi pemilih termasuk dalam partisipasi politik.

Selain itu, tingginya jumlah partisipasi pemilih selain sebagai ajang melaksanakan kedaulatan rakyat untuk memperkuat hak pemilihan umum yang *legitimate*, tingginya partisipasi pemilih juga merupakan penanda kepedulian warga Negara demokratis, sedangkan

⁵ Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 1

rendahnya partisipasi pemilih atau pengguna hak pilih merupakan indikator adanya apatisme dan ketidakpercayaan warga negara terhadap proses politik⁶.

Yang berhak memilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang sudah berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin⁷. Walaupun demikian, Indonesia tetap menerapkan pembatasan, karena tidak semua warga negara yang sudah berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin, secara otomatis dapat menggunakan hak suaranya. Ada pembatasan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat Pileg.

Pembatasan tersebut secara tegas dinyatakan pada pasal 149 yang menyebutkan bahwa pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi : (a) Pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di tps yang bersangkutan; (b) Pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan; dan (c) Pemilih yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Sedangkan pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, ketentuan tidak sama persis sebagaimana disebut pada Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pasal 111 bahwa pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: (a) Pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tetap pada TPS yang

⁶ Pangky Febrianto, *Analisis Faktor Determinan peningkatan partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017*, Volume 01, Nomor 01, 2019

⁷ Undang-undang Nomor 42 tahun 2008 Bab 1 ketentuan Umum, pasal 1.

bersangkutan dan (b) pemilih yang terdaftar pada daftar pemilihan tambahan. Tidak diatur ketentuan pemilih yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan, apakah dapat menggunakan hak suara atau tidak.

Studi mengenai partisipasi pemilih ini selain dapat memberikan gambaran perilaku pemilih juga dapat memberikan pemetaan tingkat rata-rata pemilu dari satu waktu dengan waktu lainnya. Sebagaimana telah diketahui rata-rata tingkat partisipasi pemilih dari satu pemilu dengan pemilu lainnya tidaklah sama.

Menurut data KPU partisipasi pemilih pada Pemilu Presiden 2019 ini melebihi target yang ditetapkan oleh KPU yaitu 78,90% dari target KPU 77%, dan sangat jauh berbeda dengan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu Pilwako kota Pekanbaru 2017, Pilgub Provinsi Riau dan Pilpres 2014.

Pada pemilu yang diselenggarakan 17 April 2019 terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam memilih, khususnya di Kota Pekanbaru. Apabila dibandingkan dengan pemilu tahun 2014 tingkat partisipasi pemilih pada pemilu 2019 jauh lebih tinggi. Tabel di bawah ini data perbandingan rekapitulasi pemilu Presiden tahun 2019 dan 2014.

Tabel 1.1

Prosentase Perbandingan Partisipasi Pemilih Pada pemilihan Presiden Tahun 2014 dan 2019 di Kota Pekanbaru

No	Pemilu	DPT	% Jmlh Suara	% Tidak memilih
1.	Pilpres 2014	666.651	392.917 (58,93%)	273.374 (41,06)
2.	Pilpres 2019	611.091	482.166 (78,90%)	128.975 (21,10%)

Sumber: KPU Kota Pekanbaru, 2019

Dari tabel 1.1 dapat dilihat prosentase partisipasi pemilih atau pengguna hak pilih yang ikut berpartisipasi pada pemilihan Presiden tahun 2019 di Kota Pekanbaru sangat tinggi yaitu dengan jumlah DPT, DPTb, dan DPK 611.091 dan yang ikut menyalurkan suaranya atau ikut berpartisipasi sebanyak 482.166 DPT, dengan prosentase Partisipasi pemilihnya 78,90%.

Tabel 1.2

Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Pekanbaru dalam Pemilu

PEMILU	(DPT)	PARTISIPASI	TIDAK MEMILIH
PILPRES 2014	627.072	392.917 (58,93%)	273.734 (41,06%)
PILWAKO KOTA PEKANBARU 2017	587.044	285.787 (48,69%)	301.257 (51,31%)
PILGUB PROVINSI RIAU TAHUN 2018	478.821	311.610 (65,08%)	167.211 (34,92%)
PILPRES 2019	611.091	482.116 (78,90%)	128.975 (21,10%)

Sumber : KPU kota Pekanbaru, 2019

Pada tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi memilih masyarakat pada Pilpres 2019 mengalami kenaikan yang sangat drastis yaitu sekitar 78,90% yang angka tersebut sudah melampaui target yang ditetapkan oleh KPU.

Tingginya tingkat partisipasi masyarakat Kota Pekanbaru dalam Pemilihan Presiden tahun 2019 mencapai 78,90% melebihi Pilkada Serentak Tahun 2018 yang hanya 65,08%. Peningkatan tersebut merupakan peningkatan yang paling signifikan melebihi target KPU dalam Pilpres 2019 yang hanya sebesar 77%. Hal tersebut juga merupakan peningkatan yang sangat tinggi jika melihat perbandingan dengan Pilpres

Tahun 2014 yang hanya sebesar 58,93%. Tetapi pada pemilu tahun 2019 jumlah DPT menurun dibandingkan jumlah DPT pada Pemilu tahun 2014 tetapi tingkat partisipasi pemilih jauh meningkat dibanding pemilu 2014.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas maka dapat diketahui meningkatnya angka partisipasi politik pemilih Kota Pekanbaru pada Pemilihan Presiden tahun 2019 dibandingkan Pilpres 2014 bahkan melebihi target KPU. Peningkatan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti "*Faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi politik pemilih pada Pemilihan Presiden (Pilpres) Tahun 2019 di Kota Pekanbaru*".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan di kaji oleh penulis dalam penelitian ini adalah: Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pada Pemilihan Presiden tahun 2019 di Kota Pekanbaru?.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah: Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pada Pemilihan Presiden tahun 2019 di Kota Pekanbaru.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik Pemilih pada Pemilihan Presiden tahun 2019.

b. Manfaat Praktis
Untuk menyelesaikan S1 dan memeproleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan serta diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan

bacaan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui apa faktor-faktor penyebab tingginya angka partisipasi pemilih.

KONSEP TEORI

Untuk kemudian memperjelas konsep pada penelitian ini, maka penulis merangkaikan pendapat dan teori sesuai dengan isi dan tujuan penulisan. Landasan teori adalah teori-teori yang relevan yang dapat digunakan untuk memperjelas tentang variabel yang akan diteliti:

Faktor pendukung atau faktor yang mempengaruhi peningkatan partisipasi memakai teori *Milbrath* (Maran, 2007: 156) yaitu:

1. Faktor Perangsang Politik

Faktor Perangsang politik adalah faktor dimana suatu dorongan terhadap seorang pemilih agar bersedia berpartisipasi dalam kehidupan politik⁸. Artinya, orang bersedia berpartisipasi dalam kehidupan politik menerima perangsang politik. Perangsang politik dipengaruhi oleh kegiatan diskusi politik, pengaruh media massa, dan diskusxggsi-diskusi formal dan informal.

2. Faktor Karakteristik Pribadi Pemilih

Faktor ini merupakan faktor dimana watak sosial seseorang pemilih yang mempunyai kepedulian sosial yang besar terhadap berbagai masalah⁹. Orang-orang yang berwatak sosial yang mempunyai kepedulian sosial yang besar terhadap masalah sosial, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan biasanya bersedia terlibat dalam aktivitas politik .

3. Faktor Karakteristik Sosial Pemilih

Merupakan faktor status sosial, ekonomi, kelompok ras, etnis dan agama

⁸ Maran, Rafael Raga, 2007, "*Pengantar Sosiologi Politik*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2007) hal 156

⁹ Ibid, Hal 157

seseorang yang akan mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku seseorang dalam beraktivitas¹⁰. Bagaimanapun juga karakteristik sosial ikut mempengaruhi persepsi dan sikap perilaku seseorang dalam bidang politik. Oleh sebab itulah orang bersedia berpartisipasi dalam bidang politik .

4. Faktor Situasi atau lingkungan Politik

Merupakan faktor yang dimana keadaan lingkungan sosial sekitar seorang pemilih yang baik dan kondusif agar seorang pemilih mau dengan senang hati berpartisipasi dalam aktivitas politik. Di lingkungan politik yang demokratis, orang merasa lebih bebas dan nyaman untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik daripada dalam lingkungan politik yang otoriter. Lingkungan politik yang sering diisi dengan aktivitas-aktivitas brutal dan kekerasan dengan sendirinya menjauhkan masyarakat dari wilayah politik .

5. Faktor Pendidikan Politik

Merupakan upaya pemerintah untuk merubah warga negara agar dapat memiliki kesadaran politik dengan terlibat dalam aktivitas politik. Pendidikan politik disini dapat dilakukan oleh penyelenggara pemilu, kelompok komunitas, pemerintah melalui kantor kesbangpol (kantor kesatuan Bangsa dan Politik), maupun lembaga-lembaga politik lainnya.

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada *quality* atau hal terpenting suatu barang atau jasa. Hal terpenting suatu barang

atau jasa berupa kejadian, Fenomena, dan gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi pengembang konsep teori¹¹. Penelitian kualitatif dieksplorasi dan diperdalam dari fenomena sosial atau lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat dan waktu.

Sedangkan metode deskriptif bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat pada suatu obyek penelitian tertentu dengan menggunakan metode kualitatif.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor yang mempengaruhi Partisipasi Politik Pemilih pada Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019 di Kota Pekanbaru” dilakukan di Kota pekanbaru. Penentuan lokasi penelitian dengan pertimbangan sebagai berikut: Pertama, berdasarkan latar belakang masalah, tingkat partisipasi pemilih Kota Pekanbaru meningkatkan dalam Pilpres tahun 2019 dibandingkan Pemilu tingkat lokal dan apabila dibandingkan juga dengan pemilihan umum Presiden Tahun 2014. Kedua, Pertimbangan efektifitas dan efisiensi dalam penelitian. Dan Ketiga, faktor kemudahan dalam memperoleh sumber data dalam penelitian.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif lebih menekankan pada wawancara, khususnya wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah wawancara yang dilakukan secara informal.

2. Sumber Data

¹¹ M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur. *”metodologi penelitian kualitatif”*. (Jogjakarta: AR-RUZZMEDIA, 2016) hlm 25.

¹⁰ Ibid, Hal 158

Informan penelitian didalam penelitian kualitatif berkaitan dengan bagaimana langkah yang ditempuh peneliti agar data atau informasi itu dapat diperoleh. Adapun informan penelitian yaitu: Anggota DPRD Kota Pekanbaru Komisi V, Kandidat Partai PKS, Ketua Fraksi Partai Golkar, Anggota KPU Kota Pekanbaru, Pengamat Politik Kota Pekanbaru, Anggota KPPS Kota Pekanbaru dan Pemilih Kota Pekanbaru.

3.4 Jenis Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti¹². Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung melalui wawancara terhadap informan, penulis memberikan pertanyaan berdasarkan pada teori ekonomi politik.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk dokumen, tabel-tabel atau diagram-diagram¹³. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Hasil perolehan suara pada Pemilu dari KPU Kota Pekanbaru
- b. Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilihan Umum
- c. Jurnal-jurnal tentang Pemilu Presiden

¹² Husen Umar. "motode penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis". (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011) hlm 42.

¹³ *Ibid.*

d. Internet

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari semua informan atau sumber lain terkumpul. Data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi pustaka dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif. Metode ini ditujukan untuk memahami gejala masalah yang diteliti dengan menekankan pada permasalahan pokok mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pada pemilihan Presiden tahun 2019 di Kota Pekanbaru.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemilihan umum (Pemilu) tahun 2019 merupakan pemilu serentak pertama yang melangsungkan Pileg dan Pilpres dalam waktu bersamaan. Pemilihan Presiden (Pilpres) Tahun 2019 di Kota Pekanbaru menjadi sebuah fakta menarik untuk dilihat tingginya tingkat partisipasi politik pemilih dalam peristiwa politik. Banyak kalangan menilai bahwa Pemilihan Presiden (Pilpres) lebih banyak menjadi isu yang menarik perhatian masyarakat khususnya Kota Pekanbaru dari pada Pemilu Legislatif.

Salah satu hal yang dapat dijadikan ukuran kualitas pemilihan umum adalah angka partisipasi pemilih atau angka pengguna hak pilih, yang mana partisipasi pemilih termasuk dalam partisipasi politik. Selain itu, tingginya jumlah partisipasi pemilih selain sebagai ajang melaksanakan kedaulatan rakyat untuk memperkuat hak pemilihan umum yang legitimate, tingginya partisipasi pemilih juga merupakan penanda kepedulian warga Negara demokratis, sedangkan rendahnya partisipasi pemilih atau pengguna hak pilih merupakan indikator adanya apatisme dan

ketidakpercayaan warga negara terhadap proses politik.

Pada Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019 di Kota Pekanbaru partisipasi politik pemilih dapat dikatakan baik karena masyarakat yang menggunakan hak pilihnya atau yang ikut berpartisipasi cukup besar jumlahnya bahkan melebihi target dari KPU, yakni dari total jumlah pemilih yang terdaftar sebesar 611.091 pemilih, yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 482.116 pemilih atau sekitar 78,90%. Hanya sebanyak 128.975 pemilih atau sekitar 21,10% yang tidak menggunakan hak pilihnya. Dan peningkatan partisipasi pemilih pada Pilpres 2019 ini terlihat sangat tinggi di lihat dari data yang di dapat dari KPU Kota Pekanbaru apabila dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya.

Dengan peningkatan jumlah pemilih yang ikut berpartisipasi pada Pemilihan Presiden di Kota Pekanbaru tahun 2019 ini menurut Milbrath adanya faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih.

3.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Pemilih Kota Pekanbaru pada Pemilihan Presiden Tahun 2019

3.1.1 Faktor Perangsang Politik Faktor Perangsang Politik

Adalah faktor dimana suatu dorongan terhadap seorang pemilih agar bersedia berpartisipasi dalam kehidupan politik. Artinya, orang bersedia berpartisipasi dalam kehidupan politik menerima perangsang politik. Dengan adanya perangsang politik, maka orang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam hal ini minat untuk berpartisipasi dipengaruhi oleh misalnya sering mengikuti diskusi-diskusi politik melalui media massa atau media diskusi informal maupun diskusi formal, ini merupakan suatu dorongan terhadap seorang pemilih agar bersedia

berpartisipasi dalam kehidupan politik. Rangsangan politik dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilu, partai politik, calon legislatif, calon presiden dan wakil presiden serta tim suksesnya juga.

Lembaga Penyelenggara Pemilu melakukan rangsangan politik untuk menarik minat pemilih agar ikut berpartisipasi pada pemilu 2019. KPU Kota Pekanbaru sebagai salah satu penyelenggara pemilu sudah melakukan rangsangan politik terhadap masyarakat Kota Pekanbaru dengan cara sosialisasi baik melalui media massa maupun sosialisasi langsung ke masyarakat, melakukan pendidikan politik ke sekolah sekolah yang ada di kota Pekanbaru, serta membuka forum untuk diskusi mengenai penyelenggaraan serta tata cara melakukan pemilihan dalam Pilpres 2019 yang akan datang.

Sebagaimana wawancara dengan Ibu Yelli Nofiza sebagai Anggota KPU Kota Pekanbaru sebagai berikut :

“KPU sudah melakukan berbagai macam bentuk kegiatan agar masyarakat mau datang ke TPS yang sudah di tentukan untuk memberikan suaranya dalam Pemilu 2019, terhitung dari sebelum tanggal pemilihan sosialisasi sudah gencar kami lakukan baik itu secara online melalui media massa maupun secara langsung turun ke masyarakat, diskusi terbuka juga kami berikan ke masyarakat agar masyarakat lebih paham mengenai Pemilihan tersebut. Hal-hal itu kami lakukan agar masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik. Dan KPU juga mendirikan rumah pintar Pemilu yang didalamnya ada kursus kepemiluan, riset kepemiluan, diskusi pemilu serta relawan demokrasi, serta adanya pendidikan bagi pemilih yaitu berupa cerdas cermat .” (wawancara dengan Yelli Nofiza, Kamis 27 Mei 2020, Pukul: 10.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas dengan Ibu Yelli Nofiza dapat diketahui bahwa, rangsangan politik telah dilakukan oleh KPU kota Pekanbaru kepada masyarakat baik secara online maupun offline. Sosialisasi dan diskusi terbuka dengan masyarakat gencar dilakukan. KPU Kota Pekanbaru juga mendirikan rumah pintar pemilu yang di dalamnya ada kursus kepemiluan, riset kepemiluan, diskusi pemilu serta relawan demokrasi, serta adanya pendidikan bagi pemilih yaitu berupa cerdas cermat.

Rangsangan yang dilakukan oleh KPU Kota Pekanbaru ini direspon baik oleh masyarakat, sehingga dalam Pemilu 2019 hanya (21,10%) suara yang tidak ikut berpartisipasi dalam Pemilu tersebut. Hal ini sangat jauh berbeda dengan Pilpres 2014 di Kota Pekanbaru sebanyak 41,06% suara yang tidak memilih. Sebagaimana wawancara dengan salah seorang pemilih bernama Lasmawati mengatakan :

“Pertama mengetahui akan adanya Pemilu karena ada sosialisasi dari Badan Penyelenggara Pemilu ke sekolah saya terus sering lihat juga kegiatan sosialisasi tentang Pemilu di Jalan ataupun di media sosial. Jadi pada Pemilu kemarin saya ikut memilih juga”. (Wawancara dengan Lasmawati, Rabu 30 November 2020, Pukul 15.00 WIB).

Bentuk rangsangan lain yang dilakukan oleh KPU Kota Pekanbaru adalah melalui media sosial, yang saat ini sangat mudah untuk diakses oleh semua kalangan.

Rangsangan politik lain seperti sosialisasi yang dilakukan KPU Kota Pekanbaru serta kampanye dari para tim sukses calon kandidat sangat mempengaruhi masyarakat untuk ikut memilih. Sebagaimana wawancara penulis dengan seorang pemilih Kota Pekanbaru bernama Hilyas mengatakan :

“kalau ada acara-acara seperti adanya kampanye, para caleg datang kesini saya ikut menyaksikan dan dari situ juga saya tau siapa dia, dia datang kampanye berarti membutuhkan dukungan, yang saya pilih orang yang saya tau saja yang pernah kampanye, karena sudah tua ni saya jarang main hp jadi gak tau perkembangannya juga”. (Wawancara dengan bapak Hilyas, Kamis 28 Januari, Pukul 14.00 WIB).

Mensukseskan jalannya Pemilu tahun 2019 di Kota Pekanbaru, rangsangan politik tidak hanya dilakukan oleh KPU Kota Pekanbaru, melainkan juga dari calon kandidat yang akan berlaga di Pemilu serentak tahun 2019. Para calon kandidat seperti calon legislatif, calon Presiden dan Wakil Presiden juga melakukan rangsangan politik untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat untuk memenangkan Pemilu pada tahun 2019.

Rangsangan politik juga dilakukan dengan cara memasang spanduk, baliho atau billboard di sepanjang jalan atau di tempat-tempat yang bisa dilihat banyak orang. Itu salah satu cara yang dilakukan untuk menarik perhatian masyarakat walau hanya sekedar agar masyarakat tahu saja. Sebagaimana yang dikatakan ibu Erna selaku Ketua Fraksi partai Golkar, yang mana Partai Golkar berhasil mendapatkan jumlah kursi terbanyak pada Pemilu 2019.

“Turun kelapangan melakukan kampanye untuk menarik simpatik masyarakat juga kami lakukan, tapi kampanye kami lakukan juga dalam bentuk pemasangan spanduk di jalan-jalan penyebaran brosur berisikan foto Calon kandidat dari Partai kami”. (Wawancara dengan ibu Erna, Selasa 23 Februari 2021, Pukul 11.00).

Selain Calon Legislatif yang berperan dalam mendorong partisipasi politik masyarakat, partai politik juga sangat berperan, sebagaimana hasil

wawancara penulis dengan salah satu kader partai PKS bapak Mulyadi yaitu : *“langkah pertama yang Partai PKS lakukan adalah menggerakkan kadernya ke masyarakat untuk melakukan sosialisasi dan juga memberikan pemahaman-pemahaman atau pendidikan politik kemasyarakatan dan mengadakan pertemuan disuatu daerah lalu menjelaskan kepada masyarakat kenapa harus memilih partai PKS. (Wawancara dengan kader PKS pak Mulyadi, 20 Oktober 2020, Pukul: 13.30 WIB).*

Rangsangan juga dilakukan oleh Bawaslu Kota Pekanbaru bekerjasama dengan Pemerintah Kota Pekanbaru dengan melakukan sosialisasi program Ayo Pastikan Hak Pilih Anda (AP-HPA) di area *car free day* (CFD) Jalan Cut Nyak Dien. Tujuannya untuk memberi tahu dan mengajak masyarakat Kota Pekanbaru agar melihat apakah nama mereka sudah masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) kalau sudah, maka mereka harus ikut berpartisipasi dalam pemilu dan ikut memberikan suaranya datang ke TPS.

Selain adanya rangsangan politik dari KPU, caleg, capres dan partai politik, masyarakat juga bisa mendapatkan rangsangan atau pengaruh dari media sosial. Karena persaingan untuk memenangkan kursi presiden dan wakil presiden antar Jokowi dan Prabowo dalam media sosial sangat kuat yang kemudian bisa merangsang pemilih atau para pendukungnya untuk ikut berpartisipasi. Media sosial merupakan salah satu sarana yang sering digunakan dalam mencari informasi bagi masyarakat mengenai calon kandidat yang akan berlaga dalam pemilu serentak tahun 2019.

Mencari informasi di media sosial juga merupakan alasan lain mengapa informan menggunakan media sosial untuk mencari informasi mengenai capres dan cawapres atau yang lainnya.

Media sosial mudah dijangkau sama semua kalangan umur, bukan hanya anak muda tetapi para orang tua dan anak-anakpun sudah bermain media sosial apalagi para ibu-ibu rumah tangga yang kerjanya di rumah saja dan lebih banyak waktu buat membuka media sosial di zaman modern sekarang ini. Sebagaimana wawancara penulis dengan salah satu masyarakat yang bernama Nanik sebagai berikut:

“Emang sering nyari informasi tentang capres dan cawapres di medsos. karena emang sekarang ini kalo nyari apa-apa udah pake medsos aja. Dan menurut saya lebih mudah cari di medsos dibanding media lain. Dan kadang nyari tau program dia tuh apa aja kalo nanti kepilih. Dan kadang mereka pake media sosial youtube buat nyampein visi misi mereka”. (Wawancara dengan ibu nanik, 20 Oktober 2020, Pukul: 11.15 WIB)

3.1.2 Faktor Karakteristik Pribadi Pemilih

Faktor ini merupakan faktor dimana watak sosial seseorang pemilih yang mempunyai kepedulian sosial yang besar terhadap berbagai masalah. Orang-orang yang berwatak sosial yang mempunyai kepedulian sosial yang besar terhadap masalah sosial, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan biasanya bersedia terlibat dalam aktivitas politik. Kesadaran untuk mengikuti dan ikut andil dalam keterlibatan memberikan suara dalam pemilu 2019 adalah hal yang di perlukan. Karakteristik pribadi seseorang memang tidak bisa dipaksakan tetapi dapat dipengaruhi agar bisa berubah. Dan karakteristik pribadi pemilih dapat berubah atau dipengaruhi dengan adanya rangsangan politik untuk mempengaruhi pribadi pemilih.

Pada faktor karakteristik pribadi pemilih pada pemilihan umum presiden tahun 2019, tingginya tingkat partisipasi pemilih untuk ikut memilih atau

memberikan hak suaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini jumlah pemilih yang ikut memilih pada Pemilihan Umum Presiden tahun 2019 yaitu:

Tabel 1.3
Partisipasi pemilih dalam memberikan suara pada saat pemungutan suara pada Pemilihan Umum Presiden tahun 2019

No	Partisipasi dalam memberikan suara	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Ikut memilih	482.166	78,90%
2.	Tidak ikut memilih	128.975	21,10%
	Total	611.091	100%

Sumber : KPU Kota Pekanbaru, 2019.

Dari tabel 3.2 di atas terlihat bahwa dari 611.091 jumlah DPT yakni sebanyak 128.975 (21,10%) tidak ikut berpartisipasi dan sebanyak 482.166 (78,90%) ikut berpartisipasi dalam memberikan suara pada Pemilihan Umum tahun 2019 di Kota Pekanbaru.

Pada pemilihan umum tahun 2019 dilaksanakan secara serentak untuk pemilihan pilpres bersamaan dengan pileg. Tetapi Pemilihan Presiden lebih dominan dan lebih menarik Pemilih untuk datang ke TPS memberikan suaranya dibandingkan Pemilihan Legislatif.

Karakteristik pribadi pemilih tidak akan bisa berubah walaupun berbagai macam rangsangan politik yang telah dilakukan oleh berbagai pihak agar masyarakat memberikan suaranya dalam pemilu tersebut. Karakteristik pribadi pemilih yang bersifat apatis terhadap pelaksanaan pemilu yang diadakan oleh Pemerintah, maka seseorang tersebut tetap tidak akan ikut andil dalam Pemilihan tersebut. Karakteristik pribadi seseorang pemilih merupakan suatu hal yang tidak bisa dipaksakan namun bisa dipengaruhi agar mau mengikuti pemilu

yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Hal-hal yang dapat mempengaruhi kepribadian seseorang tersebut dengan cara gencar melakukan sosialisasi serta memberikan pengaruh dari partai politik (parpol) serta calon yang memberikan visi dan misi sesuai dengan jalan pemikiran dan kepribadian dari masyarakat, sehingga masyarakat ikut serta dalam Pemilu yang diselenggarakan pemerintah tersebut.

Pada pemilu tahun 2019 banyak masyarakat yang sudah memahami pentingnya memilih atau memberikan suaranya pada pemilihan khususnya Pemilihan Presiden. Karena menurutnya, ini masa depan mereka kedepannya tergantung siapa yang akan mereka pilih dan sangat berharap calon yang menjadi pilihan mereka menang. Sebagaimana wawancara penulis dengan seorang pengamat politik Bapak Auradian Marta, sebagai berikut:

“kalau saya pribadi kenapa saya hadir ke tps untuk memilih atau memberikan hak suara saya yang pertama saya memahami tujuan pemilu itu sendiri apa dan mengerti dampak positif dan negatifnya kalau saya ikut atau tidak ikut berpartisipasi dan dengan kesukarelaan sendiri. Selain itu juga yaitu tujuannya adalah untuk memenangkan calon atau kandidat pilihan saya pribadi. Dan saya melihat rata-rata masyarakat Kota Pekanbaru sudah cerdas dan cukup rasional dalam berpartisipasi atau memilih.” (Wawancara dengan Bapak Auradian Marta, 23 Oktober 2020, Pukul:16.00 WIB).

3.1.3 Faktor Karakteristik Sosial Pemilih

Karakter sosial menyangkut status sosial ekonomi, kelompok ras, etnis dan agama seseorang. Bagaimana lingkungan sosial itu ikut mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku seseorang dalam bidang politik. Orang yang

berasal dari lingkungan sosial yang lebih rasional dan menghargai nilai-nilai seperti keterbukaan, kejujuran, keadilan dan lain-lainnya tentu akan mau juga memperjuangkan tegaknya nilai-nilai tersebut dalam bidang politik. Dan untuk itulah mereka mau berpartisipasi dalam kehidupan politik

Seperti yang diketahui bahwa karakteristik sosial seseorang juga sangat mempengaruhi keikutsertaan seseorang dalam Pemilu yang dilakukan. Perbedaan pola pemikiran didalam ras, etnis dan agama merupakan suatu hal yang patut di perhitungkan dalam penyelenggaraan pemilu. Perbedaan keyakinan pilihan parpol dan calon di setiap ras, etnis dan agama juga bisa memberikan kenaikan terhadap jumlah pemilih.

Bisa dilihat gambarannya dari pendidikan di kota Pekanbaru lebih baik dari daerah lain di provinsi Riau. Tingkat pendidikan di Kota Pekanbaru tergolong tinggi dan terbaik se Provinsi Riau karena Kota Pekanbaru merupakan Ibu Kota Provinsi Riau dan Kota terbesar di Provinsi Riau dan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. jadi membuat masyarakat cenderung rasional. Karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka ketajaman dalam menganalisa informasi tentang politik dan persoalan-persoalan sosial yang diterima semakin meningkat dan menciptakan minat dan kemampuannya dalam berpolitik.

Faktor pendidikan sangat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Tingkat pendidikan di Kota Pekanbaru lebih baik dari Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Karena Kota Pekanbaru juga merupakan Ibu Kota Provinsi Riau.

Karakteristik sosial pemilih Kota Pekanbaru cenderung rasional, karena dipengaruhi oleh faktor pendidikan di kota Pekanbaru yang lebih baik dari

Kab/kota lainya. Kota Pekanbaru juga pusat kota yang memiliki jaringan teknologi serta informasi yang tinggi dan bagus. Sosial pemilih juga berasal dari lingkungan keluarganya, ada juga pemilih yang mengikuti apa pilihan dari keluarganya ayah atau ibunya. Sebagaimana wawancara penulis dengan salah satu masyarakat Kota Pekanbaru bernama Reni Tania mengatakan, yaitu :
“ *Saya ikut berpartisipasi pada Pemilu 2019 tetapi saya memilih calon atau kandidat sesuai apa yang keluarga saya pilih dan suruh, jadi saya memilih siapa yang juga keluarga saya pilih. Dan saya juga mendukung siapa yang keluarga saya dukung pada Pemilu 2019. Minggu 10 Juni 2020, Pukul: 14.00 WIB).*

3.1.4 Faktor Situasi atau Lingkungan Politik

Merupakan faktor yang dimana keadaan lingkungan sosial sekitar seorang pemilih yang baik dan kondusif agar seorang pemilih mau dengan senang hati berpartisipasi dalam aktivitas politik. Di lingkungan politik yang demokratis, orang merasa lebih bebas dan nyaman untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik daripada dalam lingkungan politik yang otoriter. Lingkungan politik yang sering di isi dengan aktivitas-aktivitas brutal dan kekerasan dengan sendirinya menjauhkan masyarakat dari wilayah politik.

Situasi politik pada saat Pemilu 2019 cukup menjadi topik Nasional yang menarik karena Pemilihan Presiden (Pilpres) dilaksanakan bersamaan dengan Pemilu Legislatif. Faktor situasi lingkungan politik ini merupakan faktor yang paling mempengaruhi partisipasi politik pemilih pada Pemilihan Umum 2019. Di bawah ini situasi lingkungan politik yang terjadi di Kota Pekanbaru pada Pemilu 2019 diantaranya yaitu:

1. Pemilu serentak

Situasi pada saat pemilu 2019 yaitu pemilu dilaksanakan secara serentak yaitu antara Pileg dan Pilpres berlangsung secara bersamaan. Pemilu serentak jauh lebih kompleks dan rumit bagi penyelenggara pemilu, parpol, maupun masyarakat. Lebih kompleksnya karena dengan dilakukannya Pemilihan Presiden serentak dengan Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden akan mempengaruhi Pemilihan Legislatif. Artinya pemilih akan memilih Presiden dan memilih parpol pendukung Presiden. Namun yang rumitnya dengan Pemilu serentak Pilpres dan Pileg otomatis juga membutuhkan banyaknya persiapan seperti surat suara. Dan ini menjadi salah satu masalah pada saat Pemilu 2019 karena banyaknya keluhan jumlah surat suara yang kurang di tempat pemungutan suara (TPS). Sebagaimana wawancara dengan salah seorang anggota KPPS TPS 03 Kecamatan Tenayan Raya bernama Anton mengatakan :

“untuk di TPS 03 kekurangan surat suara Presiden mencapai 100 lembar surat suara bahkan lebih kayaknya, karena memang antusias masyarakat yang berpartisipasi yang besar untuk memilih Presiden daripada anggota dewan”. (Wawancara dengan bapak Anton, Senin 1 Januari 2021, Pukul 10.30 WIB).

Menariknya, pemilih tidak peduli dengan surat suara Pileg yang kekurangan yang paling terpenting harus adanya surat suara Calon Presiden dan Wakil Presiden. Walaupun pemilu serentak antara Pileg dengan Pilpres, pemilih sebagian besar datang ke TPS tujuannya hanya ingin memilih Presiden saja. Itulah penyebab juga kekurangannya surat suara Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu tahun 2019 di Kota Pekanbaru. Sebagaimana wawancara penulis dengan seorang pemilih yaitu Ibu Idah yang mengatakan:

“Tujuan untuk datang ke TPS hanya buat milih Presiden saja, kalau milih Pileg ribet terlalu banyak calonnya. Jadi milih yang sudah pasti saja”. (Wawancara dengan Ibu Idah, Selasa 2 Februari, Pukul 15.00 WIB).

2. Penyebaran Isu SARA dan Hoax

Dinamika politik menjelang Pemilu 2019 cenderung memanas, banyaknya fenomena persoalan hoaks dan ujaran kebencian. Isu politik agama dalam Pilpres 2019 menjadi salah satu hal yang paling menonjol dalam masa kampanye. Dengan isu-isu ini membuat para pendukung kedua paslon saling ingin memenangkan paslonnya masing-masing, ini merupakan salah satu faktor tingginya partisipasi pemilih, karena tidak ingin paslon yang didukungnya kalah, mereka rela pergi ke TPS untuk memilih paslon yang didukungnya.

Pada saat situasi kampanye Pilpres 2019 terlihat bahwa gejala yang terjadi adalah menguatnya eksploitasi identitas sebagai propaganda politik, atau politisasi suku, agaman, ras, antar golongan (SARA). Pada Pemilihan Umum 2019, politik identitas anti establishment dikait-kaitkan oleh identitas populis untuk menarasikan bahwa pemerintah memarginalkan kelompok muslim. Misalnya gerakan “2019 Ganti Presiden”, “Partai setan vs Partai Allah”.

Beberapa kalangan beranggapan bahwa pihak paslon nomor 2 dominan melakukan politik identitas atau populisme untuk memainkan sentimen SARA di masyarakat, terutama pada unsur agama. Namun sebenarnya paslon nomor 1 juga pada akhirnya memainkan politik identitas atau populisme untuk mengimbangi serangan-serangan politik. Jokowi dan Prabowo juga bersaing pada Pilpres 2014 yang dimenangi oleh Jokowi tetapi di Kota Pekanbaru suara terbanyak diperoleh oleh Prabowo.

Jokowi dan Prabowo juga bersaing pada Pilpres 2014 yang dimenangi oleh Jokowi tetapi di Kota Pekanbaru suara terbanyak diperoleh oleh Prabowo. Jika dilihat dari data tabel diatas apabila dibandingkan dengan persaingan lima tahun lalu, selisih suara Jokowi mengalami penurunan dibandingkan pada saat Pilpres 2019, sedangkan perolehan suara Prabowo mengalami kenaikan pada Pilpres 2019. Salah satu faktor penyebabnya juga pengaruh wakilnya yang berubah menjadi nilai tambah dimata masyarakat dan menjadi daya tarik tersendiri dengan menggandeng wakil yang baru pada Pemilu 2019.

Pada pemilu 2019 Sebelum pelaksanaan pencoblosan presiden pada hari H nya, untuk mendapatkan simpati para pemilih, pasangan Jokowi-Ma'ruf dan pasangan Prabowo-Sandiaga telah melakukan kampanye diwilayah Riau termasuk di Kota Pekanbaru, dan mengunjungi beberapa tempat untuk melakukan sosialisasi atau kampanye. Sebagaimana wawancara penulis dengan Bapak Auradian Marta selaku Pengamat politik:

“Kondisi atau situasi pada Pemilu 2019 di Kota Pekanbaru pada saat itu memang sedang terjadinya persaingan antara dua kubu yaitu Jokowi-Maaruf dan Prabowo-Sandi, yang mana Jokowi dan Prabowo sudah pernah bersaing juga pada Pemilu 2014.”. (Wawancara dengan bapak Auradian Marta, 23 Oktober 2020, Pukul: 16.00 WIB).

3. Menurunnya jumlah DPT

Pada Pemilu tahun 2019 terjadinya penurunan DPT dibanding Pemilu 2014, penurunan ini menyebabkan terjadinya lonjakan partisipasi dan ini juga merupakan salah satu faktor tingginya angka partisipasi pemilih, karena jumlah DPT yang lebih sedikit dibanding pemilu tahun 2014. Salah satu faktor yang menyebabkan

menurunnya jumlah DPT pada Pemilihan Umum 2019 di Kota Pekanbaru adalah karena tidak dilakukannya surat keterangan (Suket). Surat keterangan (Suket) adalah surat pengganti KTP Elektronik yang merupakan syarat untuk memilih. Pada Pemilihan Umum 2019 di Kota Pekanbaru pemilih yang tidak memiliki KTP Elektronik tidak bisa ikut berpartisipasi dalam memberikan hak suaranya karena tidak diberlakukannya lagi surat keterangan (suket) sebagai pengganti KTP Elektronik. Jadi banyak masyarakat yang tidak memiliki KTP Elektronik tidak bisa ikut memilih.

Keterangan yang membatasi pemberlakuan surat keterangan (suket) diatur dalam Pasal 41 A Ayat (1) dan Ayat (2) yang berbunyi : 1) Dalam hal pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Pemilih dapat memilih dengan menggunakan surat keterangan paling lambat bulan Desember 2018; 2) Terhitung sejak bulan Januari 2019, syarat terdaftar sebagai pemilih hanya menggunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik tidak berlaku lagi Surat Keterangan. Di bawah ini merupakan data perbandingan data pemilih dan pengguna hak pilih antara Pilpres 2014 dan Pilpres 2019:

Tabel 1.4

Perbandingan Rekapitulasi Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih di Kota Pekanbaru pada Pemilihan Presiden tahun 2014 dan Tahun 2019

	Tahun 2014		Tahun 2019	
	Data Pemilih	Pengguna Hak Pilih	Data Pemilih	Pengguna Hak Pilih
Jumlah Pemilih	666.651	392.917	611.093	482.116

Sumber data : KPU Kota Pekanbaru, 2019

Dengan tidak diberlakukannya lagi surat keterangan (suket) banyak masyarakat yang tidak memiliki KTP Elektronik tidak bisa memilih, atau karena terkendala pada saat mengurus surat-surat pembuatan KTP Elektronik yang berdampak pada tidak bisa memberikan hak suaranya pada saat Pemilu.

3.1.5 Faktor Pendidikan Politik

Pendidikan Politik merupakan upaya pemerintah untuk merubah warga negara agar dapat memiliki kesadaran politik dengan terlibat dalam aktivitas politik. Pendidikan politik dapat dilakukan oleh penyelenggara pemilu, kelompok komunikasi, maupun lembaga-lembaga politik lainnya dan juga dilakukan oleh partai politik. Pendidikan Politik memiliki tujuan yaitu: 1) meningkatkan partisipasi politik pemilih, 2) meningkatkan literasi politik. 3) meningkatkan kerelawaan pemilih. Artinya pendidikan politik bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang program, tahapan, jadwal, proses pemilihan umum dan makna serta pentingnya ikut berpartisipasi saat pemilihan umum, selain itu juga untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada saat Pemilu.

Pengaruh teknologi informasi juga dapat menjadikan pendidikan politik semakin baik. Pemilih bisa belajar tentang politik dari teknologi seperti contohnya dari sosial media. Mencari informasi dari sosial media lebih gampang dan sangat luas jangkauannya. Kota Pekanbaru merupakan kota metropolitan atau smart city yang masyarakatnya cenderung berpendidikan tinggi. Jadi, selain pendidikan politik dilakukan oleh partai politik atau KPU tetapi pendidikan politik bisa didapat juga melalui media sosial dan bisa belajar sendiri tentang politik itu sendiri.

Pendidikan politik telah dilakukan oleh pihak KPU Kota Pekanbaru demi mensukseskan Pemilu serentak tahun 2019 yang telah dibuat oleh Pemerintah. Hal tersebut sukses dilakukan karena peningkatan yang signifikan terjadi pada Pilpres 2019 di Kota Pekanbaru yang tingkat partisipasi masyarakatnya melebihi target KPU yaitu 78,90%. Pendidikan politik bisa dilakukan secara langsung berupa sosialisasi, membuat kegiatan berbau politik dan banyak cara yang bisa dilakukan, diantaranya bisa dilakukan melalui media sosial. Tingginya partisipasi pemilih juga bisa dipengaruhi oleh kualitas pendidikan politiknya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Pemilih pada Pemilihan Presiden (Pilpres) Tahun 2019 di Kota Pekanbaru yang telah peneliti kemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa: Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pada Pilpres 2019 ada 5 yaitu: Faktor Perangsang Politik, Faktor Karakteristik Pribadi Pemilih, Faktor Karakteristik Sosial Pemilih, Faktor Situasi atau Lingkungan Politik dan Faktor Pendidikan Politik. Kelima faktor tersebut berpengaruh dalam meningkatnya partisipasi pemilih pada Pilpres 2019. Faktor perangsang politik dan faktor situasi lingkungan politik sangat dominan mempengaruhi partisipasi pemilih karena untuk menjadi pemilih yang rasional harus adanya perangsang atau sesuatu yang mempengaruhi seseorang itu untuk menjadi rasional dan situasi politik juga menjadikan pemilih rasional dan tau mana yang pantas dipilih dengan melihat situasi politik yang terjadi pada saat itu, seperti isu-isu yang tersebar, jadi dengan melihat isu-isu tersebut pemilih bisa

menilai mana yang mau di pilih atau bagaimana hak berpartisipasinya harus digunakan

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dan analisa data yang dilakukan oleh penulis mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Pemilih pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 di Kota Pekanbaru, maka saran yang diberikan sebagai berikut:

1. Untuk lembaga penyelenggara pemilu dan Partai Politik faktor pendidikan politik masih sangat kurang. Karena pendidikan politik hanya dilakukan pada saat pemilu akan di laksanakan, pendidikan politik sangat penting bagi masyarakat untuk bisa mengetahui tentang pemilu, tentang politik serta pendidikan politik sejak dini sangat bagus. Jadi, saran dari penulis pendidikan politik harus dilakukan setiap tahunnya bukan hanya pada saat pemilu akan dilaksanakan saja. Karena itu merupakan salah satu cara menciptakan pemilih yang rasional.
2. Untuk masyarakat Kota Pekanbaru harus lebih aktif berpartisipasi pada setiap Pemilu yang diselenggarakan tidak hanya aktif berpartisipasi pada satu Pemilu saja, contohnya pada Pemilu serentak 2019, masyarakat hanya terlalu fokus berpartisipasi pada Pilpres saja sampai kurang tertarik memberikan hak suaranya pada Pemilihan umum Legislatif. Harus tetap rasional terhadap setiap Pemilu yang di selenggarakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Budiardjo Miriam, 2013, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Bungin Burhan, 2015, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi,*

Kebijakan Publik, dan Ilmu social Lainnya, Jakarta.

Cangara Hafied, 2016, *Komunikasi Politik, Konsep Teori, dan strategi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Efriza, 2012, *Political Explore: sebuah kajian ilmu politik*, Bandung: Alfabeta

Moleong, Lexy J, 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja

Rahardjo dawam, 1996, *Sistem Pemilu: Demokratisasi dan Pembangunan*, Jakarta: PT Pustaka Cidesindo

Subakti, Ramlan, 1998, *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Widia saran Indonesia

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 1

Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 2

Undang-Undang Pasal 41 A Ayat (1) dan Ayat (2)

Artikel Ilmiah

LIPI Jurnal Penelitian Politik, *Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019*. Volume 16, Nomor 01, 2019.

Solihah Ratnia, *Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik*. Volume 3, Nomor 01, 2018.

Zuhro Siti R, *Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019*. Volume 16 No.01, 2019

Sumber lain

- <https://www.kpu-pekanbarukota.go.id/>
- <https://www.riauonline.co.id/riau/kota-pekanbaru/read/2019/03/04/ini-jurus-jitu-kpu-untuk-dongkrak-partisipasi-pemilih-di-riau>
- <https://pcr.ac.id/read/23401/sosialisasi-pemilu-2019-kpu-goes-to-campus-kunjungi-pcr>